

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), DAN LAJU INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN BANYUASIN DAN OGAN ILIR
SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh :

WISNU GUSTAMA

01081002087

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

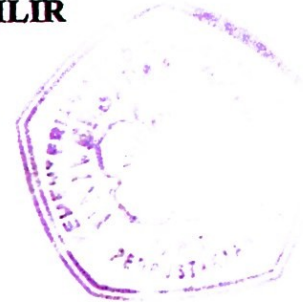
FAKULTAS EKONOMI

2014

25482/26043

S.
338. 907
Wis
a
2014
C, 1414-59

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), DAN LAJU INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN BANYUASIN DAN OGAN ILIR
SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh :

WISNU GUSTAMA

01081002087

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN LAJU INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BANYUASIN DAN KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN

Disusun oleh :

Nama : Wisnu Gustama
NIM : 01081002087
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Tanggal,

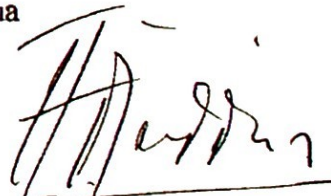
5 Desember 2013

Tanggal,

5 Desember 2013

Dosen Pembimbing

Ketua



Drs. H. Tadjuddin Husin, M.Sc

NIP: 195211261980121001

Anggota



Dra. Hj. Eka Rostartina, M.Si

NIP: 195401031983032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN LAJU INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BANYUASIN DAN KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN

Disusun oleh :

Nama : Wisnu Gustama
NIM : 01081002087
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah


Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 27 Maret 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

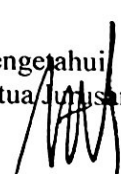
Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 27 Maret 2014

Ketua

Drs. H. Tadjuddin Husin, M.Sc
NIP 195211261980121001

Anggota

Dra. Hj. Eka Rostartina, M.Si
NIP 195401031983032001

Anggota

Drs. H.M. Hibzon, M.Si
NIP 195712141987031001

Mengetahui
Ketua Jurusan

Dr. Azwardi, S.E, M.Si
NIP 196805181993031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wisnu Gustama
NIM : 01081002087
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Laju Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir

Pembimbing :

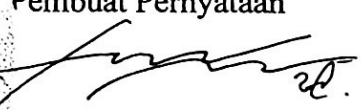
Ketua : Drs. H. Tadjuddin Husin, M.Sc
Anggota : Dra. Hj. Eka Rostartina, M.Si
Tanggal Ujian : 27 Maret 2014

adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 27 Maret 2014
Pembuat Pernyataan




Wisnu Gustama
NIM 01081002087

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Laju Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh DAU, PAD, dan laju inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di dua kabupaten yakni Banyuasin dan Ogan Ilir, serta bagaimana hubungan variabel-variabel independent tersebut terhadap variabel dependent. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ketua Jurusan
3. Sekretaris Jurusan
4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Orang Tua

Inderalaya, 27 Maret 2014

Penulis

ABSTRAK

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Laju Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir

Oleh :

Wisnu Gustama; Drs.H.Tadjuddin Husin,M.Sc.; Dra.Hj.Eka Rostartina,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Laju Inflasi (LI) terhadap pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data periode tahun 2003 sampai 2012. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, dimana analisis kuantitatif menggunakan Regresi Berganda melalui program *SPSS 16,0*. Hasil regresi Kabupaten Banyuasin menunjukkan bahwa Koefisien DAU bernilai positif (0,001) yang artinya tanpa melihat variabel independen lainnya, setiap perubahan DAU sebesar 1% akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 %. Koefisien PAD positif (0,010) berarti setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Nilai koefisien laju inflasi yang negatif berarti jika terjadi kenaikan tingkat inflasi sebesar 1% akan berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 31,35%. Sedangkan hasil regresi Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan koefisien DAU bernilai negatif (-0,001) yang artinya tanpa melihat variabel independen lainnya, setiap perubahan DAU sebesar 1% akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,1 %. Koefisien PAD positif (0,031) berarti setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,1%. Nilai koefisien laju inflasi yang negatif berarti setiap kenaikan tingkat inflasi sebesar 1% tiap tahunnya akan berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 26,15%. Hasil perhitungan dengan menggunakan elastisitas diperoleh koefisien elastisitas sebesar 7,74% (Kab.Banyuasin) dan 2,92% (Kab.Ogan Ilir) untuk DAU, 20% (Kab.Banyuasin) 2,42% (Kab.Ogan Ilir) untuk PAD, dan 4,97% (Kab.Banyuasin) 1,84% (Kab.Ogan Ilir) untuk Laju Inflasi yang berarti bersifat elastis ($E > 1$). Hal ini menunjukkan bahwa DAU, PAD dan Laju Inflasi cukup berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Laju Inflasi (LI).*

ABSTRACT

Analysis of the Influence of the General Allocation Fund, Regional Income, and the Rate of Inflation on the Economic Growth in the District Banyuasin and Ogan ilir

By :

Wisnu Gustama; Drs.H.Tadjuddin Husin,M.Sc.; Dra.Hj.Eka Rostartina,M.Si.

This research was aimed to determine how the influence of the General Allocation Fund (DAU), Regional Income (PAD), and the Rate of Inflation (LI) on the economic growth. The data used in this research are secondary data, that is data from 2003 to 2012. This research used quantitative and qualitative analysis techniques, where quantitative analysis using multiple regression through *SPSS 16.0*. Regression results show that the coefficient Banyuasin District DAU is positive (0.001) which means that regardless of other independent variables, each 1% change in the DAU will give effect to the economic growth of 0,1%. PAD positive coefficient (0.010) means that every 1% increase in revenue will lead to increase in economic growth rate of 1%. The coefficient of the inflation rate means negative if there is an increase of 1% inflation rate will impact on the decline in the economic growth of 31.35 %. While the results of the regression coefficient indicates Ogan Ilir DAU is negative (-0.001), which means regardless of other independent variables, each 1% change in the DAU will give effect to the economic growth of -0.1%. PAD positive coefficient (0.031) means that every 1% increase in revenue will lead to increase in economic growth rate of 3.1% . The coefficient of negative inflation means any increase in the rate of inflation by 1 % each year will impact on the decline in the economic growth of 26.15%. The result using the elasticity coefficient of elasticity of 7.74% (Kab.Banyuasin) and 2.92% (Kab.Ogan Ilir) for DAU, 20% (Kab.Banyuasin) 2.42% (Kab.Ogan Ilir) for PAD, and 4.97% (Kab.Banyuasin) 1.84% (Kab.Ogan Ilir) for the mean inflation rate is elastic ($E > 1$). This shows that the DAU, PAD and Inflation quite influential on Economic Growth.

Keywords : *Economic Growth, General Allocation Fund (DAU), Regional Income (PAD), Inflation Rate (LI).*

Translated from the original document by



Muslih Hambali
Instructor of Language Laboratory of
Graduate School of Sriwijaya University

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Wisnu Gustama
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Bungamas / 13 November 1990
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah (Orangtua) : Jln Ahmad Yani No.61 Kel.Pagar Agung Kab. Lahat
Alamat Email : gustamawisnu@yahoo.co.id



Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SD Negeri 16 Kab. Lahat
SLTP : SMP Negeri 1 Kab. Lahat
SMU : SMA Negeri 1 Kab. Lahat

Pendidikan Non Formal : -

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Penelitian	1
I.2 Rumusan Masalah	10
I.3 Tujuan Penelitian	10
I.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
II.1 Landasan Teori	12
II.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	12
II.1.1.1 Teori Pertumbuhan Adam Smith	13
II.1.1.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik	14
II.1.1.3 Teori Harrod-Domar	14
II.1.2 Otonomi Daerah	15
II.2 APBN dan APBD	17
II.2.1 Pengertian DAU	19

II.2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah	21
II.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22
II.2.2.1 UU No. 33 Tahun 2004 Tentang PKPD	26
II.3 Inflasi	28
II.3.1 Pengertian Inflasi	28
II.3.2 Teori Inflasi Klasik	30
II.3.3 Teori Inflasi Keynes	30
II.3.4 Teori Inflasi Moneterisme	31
II.3.5 Teori Ekspektasi	32
II.4 Penelitian Terdahulu	32
II.5 Kerangka Pemikiran	36
II.6 Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
III.1 Ruang Lingkup Penelitian	38
III.2 Jenis dan Sumber Data	38
III.3 Rancangan Penelitian	39
III.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	39
III.5 Teknik Analisis Data	40
III.5.1 Analisa Regresi Linear Berganda	40
III.6 Uji Ekonometrika	41
III.6.1 Uji Statistik	41
III.6.2 Uji Penyimpangan Klasik	42
III.7 Uji Elastisitas	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
IV.1 Gambaran Umum Variabel Makro Penelitian	45
IV.1.1 Administratif Pemerintahan Kab. Banyuasin	45
IV.1.1.1 Penduduk	48
IV.1.1.2 APBD Banyuasin	50
IV.1.1.3 Perkembangan PDRB Kab. Banyuasin	51
IV.1.2 Administratif Pemerintahan Kab. Ogan Ilir	54
IV.1.2.1 Penduduk	56
IV.1.2.2 APBD Ogan Ilir	58
IV.1.2.3 Perkembangan PDRB Kab. Ogan Ilir	59
IV.2 Hasil dan Pembahasan	61
IV.2.1 Hasil Pengujian Kabupaten Banyuasin	62
IV.2.1.1 Uji Statistik	63
IV.2.1.2 Uji Penyimpangan Klasik	68
IV.2.1.3 Uji Elastisitas Kab Banyuasin	70
IV.2.2 Hasil Pengujian Kabupaten Ogan Ilir	72
IV.2.1.1 Uji Statistik	73
IV.2.1.2 Uji Penyimpangan Klasik	77
IV.2.1.3 Uji Elastisitas Kab Ogan Ilir	79
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 82
V.1 Kesimpulan	82
V.2 Saran	85
 Daftar Pustaka	 86
LAMPIRAN	91

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian suatu negara umumnya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi baik pusat maupun daerah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Pembangunan daerah dapat menjadi cerminan pertumbuhan ekonomi negara (Ulfah, 2012:1). Kemajuan perekonomian suatu daerah akan memberikan dampak positif bagi meningkatnya ekonomi suatu negara. Sebab itulah era desentralisasi dimulai agar setiap daerah mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya serta mengurus pemerintahannya sendiri guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sendiri tidak menganut desentralisasi dan otonomi daerah dalam arti kebebasan penuh tetapi menganut otonomi dalam arti kebebasan terbatas (Zeth; 2003 : 21). Hal ini menandakan bahwa otonomi daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah tetap memiliki batasan-batasan yang berlaku sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Salah satu faktor terpenting dalam menjalankan roda perekonomian suatu daerah adalah peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai segala macam belanja pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diperoleh dengan menggali segala potensi yang ada di daerah tersebut guna menunjang laju perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan suatu daerah yang memiliki perekonomian yang kuat dan mampu tumbuh dan berkesinambungan, pemerintah daerah haruslah mengerti dan mampu untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan dan produktif yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertumbuhan ekonomi yang mapan akan menjadi tolok ukur yang penting bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kuncoro (1995 : 334-358), dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat mencolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dalam membiayai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan (Badan Pusat Statistik).

Apabila dilihat dari data APBD yang tersedia di BPS, besarnya belanja daerah memerlukan dana yang cukup untuk menutupi segala bentuk jenis pengeluaran. Oleh sebab itulah PAD umumnya tidaklah cukup untuk membiayai segala keperluan pembangunan suatu daerah, sehingga transfer dari Pemerintah pusat sangatlah dibutuhkan yang salah satunya adalah melalui dana alokasi

umum. Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Transfer dari Pemerintah Pusat penting untuk Pemda dalam menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Sidik & Simanjuntak, 2002:54). Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar-daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktivitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, seperti ditegaskan dalam UU No. 33/2004, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (*revenue sharing*).

Sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah pusat wajib menjaga perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Pemerintah pusat memberikan transfer kepada pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai pembangunan pemerintah daerah, disamping hal itu Pemerintah Daerah diharapkan mampu mencari sumber dana sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membantu pembiayaan pada Belanja Daerah (Anjar, 2010:25).

Semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang dibagikan ke daerah, makin meningkat pula kesempatan melaksanakan pembangunan di daerah, namun kemajuan yang dicapai tidak akan pernah menciptakan kesamaan tingkat kemajuan dan kesejahteraan antar daerah. Dikarenakan daerah yang tertinggal dan

miskin tidak mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah yang sudah lebih dahulu maju. Apabila formula DAU dengan kebijakan historis itu diteruskan, dalam jangka panjang yang akan terjadi adalah kesenjangan yang makin meluas antara kota dan kabupaten (desa), serta antara daerah maju dan tertinggal. Karena tidak akan ada *convergency* tingkat kesejahteraan daerah miskin dengan daerah maju, sebaliknya yang terjadi adalah *divergency* (MintoHarjdo, dikutip dalam Ahmad, 2010:2)

Pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dapat saling mempengaruhi. Oleh sebab itulah pelimpahan dana alokasi umum dari pusat ke daerah terus-menerus dilakukan guna menunjang laju perekonomian di daerah yang diharapkan mampu meningkatkan laju perekonomian daerahnya sendiri sehingga berimbas pada kenaikan perekonomian secara nasional

Umumnya, tiap-tiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi geografis maupun dari segi potensi keuangan daerahnya. Begitu juga dengan Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir. Sebagai salah satu daerah otonom yang baru terbentuk, memungkinkan daerah ini untuk menggali segala potensi daerah yang tersimpan untuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai kegiatan perekonomian yang sedang berlangsung.

Sebagai daerah otonom yang baru, Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir terus berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya. Hal ini tercermin dari upaya pemerintah daerah yang terus berusaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Namun karena daerah yang belum lama terbentuk, dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi andalan bagi daerah

Banyuasin dan Ogan Ilir untuk menjalankan roda perekonomiannya. Berikut dibawah ini adalah tabel perbandingan antara dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir.

Tabel I.1
DAU dan PAD Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir (Periode 2003-2012)
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Banyuasin		Ogan Ilir	
	DAU	PAD	DAU	PAD
2003	104.580.000,-	3.024.035,-	303.050.000,-	11.474.014,-
2004	176.030.832,-	5.040.009,-	335.451.440,-	12.848.840,-
2005	210.948.000,-	8.906.661,-	98.365.000,-	8.294.720,-
2006	338.348.000,-	15.903.620,-	237.326.000,-	10.049.160,-
2007	384.981.000,-	14.944.815,-	260.428.000,-	11.495.177,-
2008	429.915.555,-	12.867.782,-	288.510.604,-	12.080.239,-
2009	444.349.776,-	17.009.204,-	282.733.012,-	9.799.887,-
2010	451.230.547,-	22.497.332,-	288.392.166,-	10.017.813,-
2011	539.128.370,-	28.782.084,-	363.062.000,-	16.102.000,-
2012*	651.357.692,-	26.626.183,-	446.518.667,-	30.134.000,-

Sumber; -BPS Provinsi Sumsel (* data bersifat sementara)
-dispenda Kab.Ogan Ilir

Dari tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan DAU dan PAD Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2012. Pada Kabupaten Banyuasin, tahun 2007 terjadi kenaikan DAU sebesar 13,8 % dari tahun sebelumnya, dan seterusnya terjadi peningkatan hingga pada tahun 2012 sebesar 20,8 % dari tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada PAD ditahun 2007 sebesar 6,41 % dari tahun 2006. Penurunan juga dialami oleh PAD di tahun 2008 sebesar 16 %, namun setelah itu selalu terjadi kenaikan kembali sampai pada tahun 2012 mengalami penurunan 7,5 %. Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Ogan ilir, pada tahun 2007 terjadi kenaikan DAU sebesar 9,7% dari tahun sebelumnya. Penurunan juga terjadi ditahun 2009 sebesar 2,04% dan

seterusnya terjadi peningkatan hingga pada tahun 2012 sebesar 23% dari tahun sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada PAD ditahun 2007 sebesar 14% dari tahun 2006. Penurunan juga dialami oleh PAD di tahun 2009 sebesar 23,3%, namun setelah itu selalu terjadi kenaikan kembali sampai pada tahun 2012 mencapai 87%.

Menurut Anjar Setiawan (2010:4)” Transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan dalam APBD ”.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto. PDRB merefleksikan besarnya produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Melalui perhitungan kontribusi sektor-sektor terhadap PDRB, dapat dilihat kinerja masing-masing sektor terhadap perekonomian daerah tersebut. Selain itu dengan diketahuinya peranan masing-masing sektor dapat dilakukan prediksi ekonomi guna menentukan arah kebijakan yang akan datang.

PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten /kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kelender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral.

Juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

Tabel I.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir
(Periode 2003-2012)

Tahun	Kabupaten Banyuasin		Kabupaten Ogan Ilir	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
2003	3.282.837	2.611.343	1.237.073	1.214.324
2004	3.676.197	2.745.016	1.351.713	1.266.932
2005	4.035.206	2.876.201	1.492.710	1.326.451
2006	4.481.569	3.052.270	1.651.281	1.394.872
2007	5.044.404	3.251.448	1.865.973	1.465.068
2008	2.611.343	3.437.375	1.214.324	1.540.157
2009	2.876.201	3.648.584	1.326.451	1.622.680
2010	3.251.448	3.936.246	1.465.068	1.720.389
2011	3.648.584	4.226.257	1.622.680	1.836.964
2012*	4.226.257	4.541.067	1.836.964	1.965.207

*Sumber; BPS Provinsi Sumsel (*data bersifat sementara)
BPS Kab. Ogan Ilir (data diolah)
Dispenda Kab. Ogan Ilir*

Berdasarkan angka BPS pada tabel I.2, PDRB atas dasar harga konstan mencatat adanya pertumbuhan di Kabupaten Banyuasin, diantaranya pada tahun 2004 terjadi pertumbuhan sebesar 11,35 persen dengan migas. Kenaikkan juga terjadi sepanjang tahun seperti tahun 2008 sebesar 5,3 persen dengan migas serta tahun 2012 sebesar 15,7 persen dengan migas dan 6,27 persen tanpa migas.

Pada Kabupaten Ogan Ilir juga terlihat adanya pertumbuhan ekonomi, diantaranya pada tahun 2005 terjadi pertumbuhan sebesar 4,71 persen dengan migas dan 4,69 persen tanpa migas. Kenaikkan juga terjadi sepanjang tahun seperti tahun 2008 sebesar 5,07 persen dengan migas serta tahun 2012 sebesar 6,84 persen dengan migas dan 6,98 persen tanpa migas.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah khususnya Banyuasin dan Ogan Ilir tidak terlepas dari berbagai kebijakan pusat, yang dalam arti kondisi yang dialami

oleh suatu negara atau bersifat nasional juga dapat mempengaruhi kebijakan di daerah tersebut, misalnya inflasi yang sering terjadi di dalam negeri secara tidak langsung akan mempengaruhi laju inflasi yang ada di daerahnya.

Inflasi merupakan suatu fenomena moneter yang selalu meresahkan dan menggerogoti kebijakan ekonomi suatu negara maupun di daerah khususnya yang sedang melakukan perbaikan. Inflasi tidak hanya mendorong kenaikan harga-harga umum dan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, tetapi antara kaya dan miskin, majikan dan pembantu, buruh dan karyawan serta kepercayaan masyarakat kepada suatu pemerintahan.

Laju Inflasi merupakan salah satu indikator yang dapat dihasilkan dari perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) menurut harga berlaku dan konstan. Laju inflasi menggambarkan adanya kenaikan harga-harga secara agregat. Laju inflasi yang tinggi dapat menunjukkan adanya ketidakstabilan perekonomian.

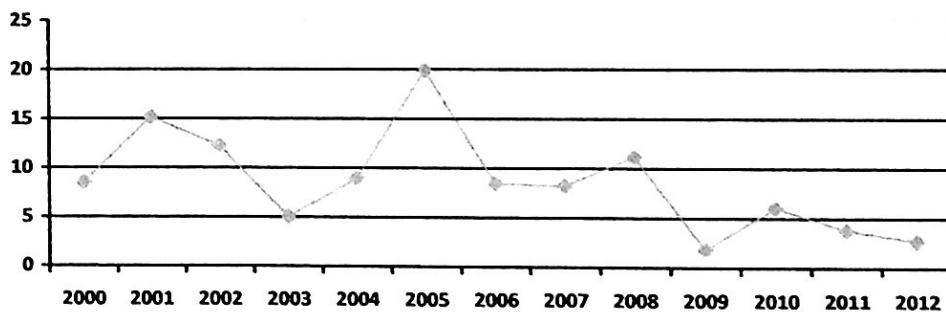
Perkembangan laju inflasi Kabupaten Banyuasin tidak terlepas dari kebijakan yang dibuat secara nasional maupun regional. Sebagai contoh pada tahun 2004 pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), tidak stabilnya politik menjelang pemilu menyebabkan inflasi hampir mendekati dua digit (8,85 persen). Laju inflasi PDRB Kabupaten Banyuasin pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 14,9% dibanding tahun 2007. Inflasi kembali meningkat pada tahun 2010 hingga mencapai 8,1%. Laju inflasi PDRB Kabupaten Ogan ilir pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 8,30% dibanding tahun 2004. Inflasi kembali meningkat pada tahun 2011 hingga mencapai 8,50%.

Perbandingan juga dapat dilihat pada laju inflasi Kota Palembang yang merupakan cerminan laju inflasi Provinsi Sumatera Selatan. Pada Kota Palembang, laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 mencapai 19,92 % dan laju inflasi terendah pada Kota Palembang terjadi pada tahun 2009 sebesar 1,85 persen dan tahun 2012 sebesar 2,72 %

Tabel I.3
Laju Inflasi Sumatera Selatan
(dalam persen)

Tahun	Laju Inflasi
2000	8,49
2001	15,15
2002	12,25
2003	5,03
2004	8,94
2005	19,92
2006	8,44
2007	8,21
2008	11,15
2009	1,85
2010	6,02
2011	3,78
2012	2,72

Sumber :Badan Pusat Statistik Palembang.



Gambar I.1 Perkembangan Laju Inflasi Sumatera Selatan

Dari berbagai penjelasan tersebut diatas maka penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul:

“Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Laju Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan”

I.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah:

1. Mengukur seberapa besar pengaruh DAU, PAD, dan Laju Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Sumatra Selatan?
2. Untuk mengetahui elastisitas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir sebagai akibat perubahan DAU,PAD,dan Laju Inflasi?

I.3. Tujuan

Berdasarkan atas permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh DAU, PAD, dan Laju Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir.
2. Untuk melihat seberapa besar elastisitas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir sebagai akibat dari pengaruh DAU,PAD, dan Laju Inflasi.

I.4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proporsi DAU, PAD, dan Laju Inflasi Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir serta menguraikan pengaruh DAU, PAD, dan Laju Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bisa dijadikan suatu masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir dalam pemanfaatan PAD dan Dana Alokasi Umum sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukry dan Abdul Halim, 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*, SNA, Surabaya, Oktober 2003.
- Adi, Priyo Hari, 2006, *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah* .Jurnal Kritis, Universitas Kristen Satya Wacana ,Salatiga.
- Arlini, Sofia *et al.* 2011. *Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Investasi, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat*. Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta.
- Badan Pusat Statistik Palembang.2013. *Palembang dalam angka berbagai edisi*. BPS. Palembang: BPS.
- Biro Pusat Statistik. 2002. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ogan Ilir 2000-2011*.
- Boediono.1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE UM. Yogyakarta
- Boediono.2000. *Ekonomi Moneter*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta
- Boediono.2002. *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal. Melalui Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional*.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco. Bandung
- Bukhari, Ikhwan. 2012. *Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Inflasi dan Perekonomian Indonesia*. Makalah. Diambil pada tanggal 20 Juni 2013 dari <http://ikhwanbukhari.blogspot.com/2012/12/makalah-dampak-kenaikan-harga-bahan.html>
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2006. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X.

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta

Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga. Jakarta

Ghozali, Imam dan Fuad. 2005. *Structural Equation Modelling (Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Program LISREL 8.54)*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

Gusmao, Lourenco. 2011. *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Tingkat Inflasi Terhadap Minat Menabung Konsumen (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Financa Dili Timor Leste)*. Skripsi. Institute Of Business. Timor Leste.

Hoessein, Bhenyamin. 2000. Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah dalam Bisnis & Birokrasi, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Nomor 1/Volume I/Juli/2000.

http://banyuasinkab.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=213

<http://www.djpk.depkeu.go.id>

<http://www.oganilirkab.go.id>

http://oganilirkab.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=213

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi

http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi_dan_perekonomian_Indonesia

_____, 2001. *Anggaran Daerah dan "Fiscal Stress" (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (4): 346-357.

Jhingan, ML, 2000. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*, Edisi Pertama, CV.Rajawali, Jakarta.

Jhingan, ML, 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali Press, Jakarta

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana*

Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 181/2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang *Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001*.
- Koswara. 2000. *Otonomi dan Pajak Daerah*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi daerah*. Penerbit Fokusmedia . Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Lewis, Blane D. 2003. *Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia*. Research Triangle Institute. North Carolina. Working Paper.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Penerbit BPFE UOM. Yogyakarta
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta
- Pasaribu, Ahmad Munarwi. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya (tidak dipublikasi)
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Pujiati, Amin. 2007, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang
- , Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.

- , Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.
- , Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 Tentang *Dana Perimbangan*.
- , Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- , Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Anjar. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)*. *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Sidik, Machfud, dan Robert Simanjuntak. 2002. *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Jakarta, Buku Kompas.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Makro Ekonomi. Edisi Ketiga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Tao Zhanga & Heng-fu Zou. 1997. *Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China*. China: Institute of Advanced Studies, Wuhan University
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang APBN dan APBD
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pendapatan Asli Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 & 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Ulfah, Maria. 2012. *Pengaruh Investasi Asing Langsung dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan*. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya (tidak dipublikasi)

- Ulum, 2002. *Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar*, Cahaya Press, Malang.
- Ulum, 2002. *Analisis atas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pengaruhnya terhadap Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Kabupaten/Kota di Jawa Timur*
- Wardhany, Fajar. 2009. *Pengaruh Faktor Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi*
- Wijaya, Pransismas Andi. 2011. *Pengaruh Tingkat Inflasi dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Soloraya Tahun 2004-2009. Skripsi*, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta.
- Yani, Ahmad. 2002 *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Zeth, Rachman. HRA. 2003. *Elastisitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap PAD Kota Palembang. Tesis*, PPS-UNSRI.

ooOoo